

**PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, *WHISTLEBLOWING SYSTEM*,  
KESADARAN ANTI-KECURANGAN DAN *ETHICAL CLIMATE* TERHADAP  
PENCEGAHAN KECURANGAN  
(STUDI KASUS PADA PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU)**

Reza Yetri Oktaviani <sup>1)</sup>, Dian Puji Puspita Sari <sup>2)</sup>, Siti Samsiah <sup>3)</sup>  
Universitas Muhammadiyah Riau

Correspondence		
Email: 200301043@student.umri.ac.id	No. Telp:	
Submitted: 15 August 2024	Accepted: 25 August 2024	Published: 28 August 2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, *whistleblowing system*, kesadaran anti - kecurangan dan *ethical climate* terhadap pencegahan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan kepada auditor di Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 76 responden. Metode penelitian yang digunakan adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan program SPSS Statistics versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur, *whistleblowing system*, kesadaran anti - kecurangan dan *ethical climate* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

**Kata Kunci :** Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing System*, Kesadaran Anti- Kecurangan, *Ethical Climate*, Pencegahan Kecurangan

### ABSTRACT

*This research aims to determine the influence of apparatus competency, whistleblowing system, anti-fraud awareness and ethical climate on fraud prevention among BPKP Representatives in Riau Province. This research is quantitative research using a questionnaire distributed to auditors at the BPKP Representative of Riau Province. The sample used in this research was 76 respondents. The research method used was purposive sampling. This research uses the SPSS Statistics version 26 program. The results of this research show that apparatus competency, whistleblowing system, anti-fraud awareness and ethical climate influence fraud prevention.*

**Keywords :** Apparatus Competence, Whistleblowing System, Anti-Fraud Awareness, Ethical

*Climate, Fraud Prevention.*

## Pendahuluan

Kecurangan atau *fraud* merujuk pada tindakan atau praktik yang melibatkan penipuan, manipulasi atau tindakan tidak jujur dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah dan merugikan pihak lain. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan banyaknya berita penangkapan para tokoh politik karena kasus korupsi. Menurut Penelitian dari *Survey Fraud Indonesia* (SFI) yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) dengan melibatkan 239 responden menunjukkan bahwa *fraud* yang paling banyak atau paling sering terjadi dan menimbulkan kerugian terbesar di Indonesia adalah terkait dengan tindakan korupsi dengan total 64,4%, diikuti oleh penyalahgunaan aset atau kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, dan terakhir yaitu *fraud* laporan keuangan sebesar 6,7% (ACFE Indonesia, 2020).

Tujuan pencegahan kecurangan adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kegiatan kecurangan yang membahayakan kepentingan umum dan mengganggu pelayanan publik serta kemajuan negara. Khususnya sektor Industri keuangan dan sektor fiskal dimana merupakan dua entitas vital yang memainkan peran sentral dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Lembaga-lembaga audit sektor publik di Indonesia terdiri dari lembaga pemeriksa dari luar pemerintah dan lembaga pemeriksa dari dalam pemerintah. Menurut Taufik (2011) dalam Pupung Purnamasari (2024) lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat melakukan upaya pencegahan dini terhadap *fraud* di lingkungan pemerintah untuk mengurangi kerugian keuangan negara dan daerah yang lebih besar.

Salah satu kasus yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau yaitu kasus terkait korupsi pengadaan fiktif bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2019-2021 di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Rohul yang merugikan Negara sebesar 6,2 miliar, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau merupakan lembaga yang bertugas melakukan audit dalam kasus ini. Dan mereka sempat mendapatkan desakan dari para mahasiswa karena terkesan menunda audit, dimana kasus ini pada saat itu sudah berjalan selama 3 bulan (skinusantara.com, 2023).

Berdasarkan kasus diatas, semakin lama waktu yang dibutuhkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau dalam menyelesaikan atau mempublikasikan hasil auditnya maka akan semakin terbuka kesempatan atau peluang bagi

pihak – pihak yang ingin melakukan kecurangan sehingga informasi yang tertunda dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Berdasarkan teori segitiga kecurangan (*fraud triangle*), kesempatan merupakan salah satu penyebab terjadinya suatu kecurangan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau sebagai badan yang bertugas menghitung jumlah kerugian negara akibat suatu kasus korupsi akan menjadi rentan terhadap tawaran-tawaran menjanjikan yang diterima oleh para pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau untuk dapat melakukan manipulasi terhadap hasil audit.

Pencegahan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan atau upaya untuk mencegah atau menahan agar seseorang tidak melakukan perbuatan kecurangan (Hariawan et al., 2020). Pencegahan kecurangan haruslah dilakukan agar negara tidak mengalami kerugian khususnya pada segi keuangan dimana nantinya hal ini akan berpengaruh kepada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia, untuk itu pencegahan ini dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai aspek, termasuk kebijakan pemerintah, peran sektor swasta dan partisipasi masyarakat.

## Tinjauan Pustaka

### Teori Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle Theory*)

*Fraud Triangle* adalah teori yang pertama kali dikemukakan oleh Donald Cressey pada tahun 1953. Teori ini menjelaskan mengapa seseorang melakukan tindakan penipuan atau kecurangan. Pada teori ini dijelaskan mengenai Tiga faktor yang disebut sebagai "segitiga" karena interaksi mereka cenderung menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya tindakan kecurangan. Adapun ketiga faktor tersebut yaitu *Pressure* (Tekanan), *Opportunity* (Kesempatan) dan *Rationalization* (Rasionalisasi)

### Teori Planned Behaviour

*Theory of planned behavior* (TPB) adalah teori dikemukakan oleh seorang ahli psikologi sosial bernama Izek Ajzen pada tahun 1991, dimana teori ini merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor individu saat berperilaku. *Theory of planned behavior* menjelaskan mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk berperilaku dan niat individu tersebut disebabkan oleh beberapa faktor internal dan eksternal dari individu (Hariawan et al., 2020). Ada 3 faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang antara lain sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Persepsi

### **Pencegahan Kecurangan**

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE, 2016), kecurangan merupakan tindakan yang melawan hukum dan dilakukan dengan sengaja dengan tujuan tertentu untuk memanipulasi atau memberikan informasi yang keliru dan dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Untuk itu dibutuhkan adanya tindakan pencegahan terhadap kecurangan yang dapat merugikan pihak lain.

### **Kompetensi Aparatur**

Menurut Kurniawan (2015) dalam Wempi (2020) Kompetensi aparatur adalah suatu kemampuan yang berhubungan dengan kegiatan mental, kegiatan berpikir, dan sumber perubahan yang dilakukan dalam proses pemecahan masalah, perubahan sosial, dan mendorong perilaku yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas kerja dalam instansi pemerintahan. Berdasarkan aturan pemerintah melalui Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 maka kompetensi dapat diartikan sebagai suatu keahlian atau pengalaman pendidikan, pengetahuan yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan ataupun tentang hal-hal di bidang tertentu.

### **Whistleblowing System**

*Whistleblowing* adalah suatu tindakan pengungkapan kepada pihak internal (manajemen yang lebih tinggi) atau kepada pihak eksternal yang berwenang dan/atau kepada publik tentang adanya suatu yang dipercaya sebagai perilaku yang tidak etis, tidak bermoral, serta melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap pemangku kepentingan maupun organisasi. Pihak yang melakukan pelaporan atas perbuatan tidak etis tersebut dinamakan dengan *whistleblower*. Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah suatu hal yang mudah. Seseorang yang mengetahui adanya tindak kecurangan dalam organisasi umumnya akan mengalami suatu dilema dalam memutuskan apakah harus mengungkapkan kecurangan tersebut atau tetap membiarkannya tersembunyi (Dianingsih & Pratolo 2018).

### **Kesadaran Anti-Kecurangan**

Menurut penelitian Wulandari dan Nuryatno (2018) dalam (Arpani et al., 2022) kesadaran anti-kecurangan sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya upaya pencegahan kecurangan oleh semua pihak dalam organisasi. Melalui kesadaran anti-kecurangan yang tinggi diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian dan

kepekaan semua pihak terhadap bahaya kecurangan dan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kecurangan.

### ***Ethical Climate***

Menurut Martin dan Cullen (2006) dalam (Cucuani et al., 2022) *Ethical climate* adalah persepsi bersama terkait sikap yang benar dalam hubungannya terkait dengan tujuan, sasaran kebijakan dan prosedur dalam organisasi. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Robbie & Praharjo 2020) mengatakan bahwa iklim etis berarti persepsi bersama yang dapat diterima mengenai perilaku, hubungan, penggunaan kekuasaan dan standar etika dalam suatu organisasi tanpa pengumuman tertulis. Persepsi ini dapat mempengaruhi sikap, pengambilan keputusan dan perilaku etis.

### **Metode Penelitian**

Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala likert 1-5. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor pada perwakilan BPKP Provinsi Riau, dimana sampel yang diambil sebanyak 76 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu Purposive Sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan bantuan program SPSS Ver 26. Pengukuran variabel penelitian sepenuhnya merupakan skala yang dikembangkan oleh peneliti sebelumnya. Pengukuran variabel kompetensi aparatur dengan menggunakan skala pengukuran yang dikembangkan oleh nur fahmi (2023) sebanyak 9 item pernyataan, pengukuran variabel *whistleblowing system* menggunakan skala yang dikembangkan oleh wempi yudha (2020) yang terdiri dari 11 item pernyataan, pengukuran variabel kesadaran anti - kecurangan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikembangkan oleh wempi yudha (2020) yang terdiri dari 7 pernyataan, pengukuran variabel *ethical climate* menggunakan skala yang dikembangkan oleh Azzahra Natasha Shafira (2021) yang terdiri dari 5 item pernyataan dan pengukuran variabel pencegahan kecurangan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikembangkan oleh wempi yudha (2020) yang terdiri dari 11 pernyataan.

### **Hasil Penelitian**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi aparatur, *whistleblowing system*, kesadaran anti-kecurangan dan *ethical climate* terhadap pencegahan kecurangan di Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Hasil analisis regresi berganda menggunakan SPSS 26 dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1 Analisis Regresi Linear Berganda**

Model	Unstandardized		Standardized	Sig.
	Coefficients		Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	44,583	6,287		0,000
Kompetensi Aparatur (X1)	-0,644	0,162	-0,449	0,000
Whistleblowing Syetem (X2)	0,471	0,132	0,375	0,001
Kesadaran Anti-Kecurangan (X3)	0,966	0,189	0,555	0,000
Ethical Climate (X4)	-1,045	0,189	-0,556	0,000

a. *Dependent Variable:* Pencegahan Kecurangan (Y)

Sumber : Data primer yang diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 4.1 di atas terlihat bahwa hasil analisis regresi linear berganda dalam model persamaan berikut:

$$Y = 44,583 - 0,644X_1 + 0,471X_2 + 0,966X_3 - 1,045X_4 + e$$

Di mana :

Y = Pencegahan Kecurangan

X<sub>1</sub> = Kompetensi Aparatur

X<sub>2</sub> = *Whistleblowing System*

X<sub>3</sub> = Kesadaran Anti-Kecurangan

X<sub>4</sub> = *Ethical Climate*

Berdasarkan persamaan regresi tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai *constant* atau  $\alpha$  sebesar 44,583 Artinya apabila Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing System*, Kesadaran Anti-Kecurangan dan *Ethical Climate* sebagai variabel independen bernilai 0, maka Pencegahan Kecurangan sebesar 44,583.
2. Nilai koefisien regresi variabel Kompetensi Aparatur (X<sub>1</sub>) sebesar -0,644. Artinya jika variabel Kompetensi Aparatur (X<sub>1</sub>) mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap maka Pencegahan Kecurangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,644.
3. Nilai koefisien regresi variabel *Whistleblowing System* (X<sub>2</sub>) sebesar 0,471. Artinya jika variabel *Whistleblowing System* (X<sub>2</sub>) mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap maka Pencegahan Kecurangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,471.

4. Nilai koefisien variabel Kesadaran Anti-Kecurangan (X3) sebesar 0,966. Artinya jika variabel Kesadaran Anti-Kecurangan (X3) mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap maka Pencegahan Kecurangan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,966.

5. Nilai koefisien variabel *Ethical Climate* (X4) sebesar -1,045. Artinya jika variabel *Ethical Climate* (X4) mengalami kenaikan 1 satuan dengan asumsi variabel lain bernilai tetap maka Pencegahan Kecurangan (Y) akan mengalami penurunan sebesar -1,045.

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan Uji secara parsial (Uji t) dan pembahasannya untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Uji T ( Uji Parsial )**

*Coefficients<sup>a</sup>*

Model	Unstandardized		Standardized		t	Sig.
	Coefficients		Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	44,583	6,287			7,092	0,000
Kompetensi Aparatur (X1)	-0,644	0,162	-0,449		-3,975	0,000
Whistleblowing System (X2)	0,471	0,132	0,375		3,576	0,001
Kesadaran Anti-Kecurangan (X3)	0,966	0,189	0,555		5,117	0,000
Ethical Climate (X4)	-1,045	0,189	-0,556		-5,514	0,000

a. *Dependent Variable:* Pencegahan Kecurangan (Y)

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap pencegahan kecurangan Berdasarkan hasil uji t, variabel Kompetensi Aparatur diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-3,975 < -1,996 t_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Maka ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima artinya hal ini menjelaskan bahwa variabel Kompetensi Aparatur berpengaruh negatif terhadap Pencegahan Kecurangan.

2. Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan Berdasarkan hasil uji t, variabel *Whistleblowing System* diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $3,576 > 1,996 t_{tabel}$  dengan

nilai signifikan sebesar  $0,001 < 0,05$  maka ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima artinya hal ini menjelaskan bahwa variabel Independensi secara parsial berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan.

3. Pengaruh Kesadaran Anti-Kecurangan Terhadap Pencegahan Kecurangan Berdasarkan hasil uji t, variabel kesadaran anti – kecurangan diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $5,117 < 1,996 t_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 > 0,05$  maka ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima artinya hal ini menjelaskan bahwa variabel kesadaran anti-kecurangan berpengaruh terhadap Pencegahan Kecurangan.

4. Pengaruh *Ethical Climate* Terhadap Pencegahan Kecurasngan Berdasarkan hasil uji t, variabel *Ethical Climate* diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-5,514 < -1,996 t_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  maka ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima artinya hal ini menjelaskan bahwa variabel *Ethical Climate* berpengaruh negatif terhadap Pencegahan Kecurangan.

**Tabel 4.3 Uji F ( Uji Simultan )**

F hitung	F tabel	Signifikansi	Alpha	Keputusan
14,238	2,74	0,000	0,05	Diterima

Adapun Uji F pada penelitian ini Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai  $f_{hitung}$   $14,328 > 2,74 f_{tabel}$  dengan nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  artinya variabel kompetensi aparatur, *whistleblowing system*, kesadaran anti-kecurangan dan *ethical climate* berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan kecurangsan.

**Tabel 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,681 <sup>a</sup>	0,463	0,431	4,514

Dari hasil penelitian ini Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) yang diperoleh sebesar 0,431. Artinya adalah bahwa sebesar 43,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam model penelitian ini, yaitu Kompetensi Aparatur, *Whistleblowing System*, Kesadaran Anti-Kecurangan, dan *Ethical Climate* secara bersama-sama hanya mampu menjelaskan 43,1% dari pencegahan

kecurangan. Sedangkan sisanya 56,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil dari data yang diolah, menunjukkan bahwa variabel kompetensi aparatur berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan, artinya semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur maka tingkat pencegahan kecurangan akan menurun.

Hasil penelitian ini mendukung *fraud triangle theory* yaitu terkait dengan kesempatan, dimana seorang aparatur yang berkompeten atau memiliki kompetensi yang tinggi akan memanfaatkan kesempatan dan mencari celah atau kelemahan dari sebuah sistem untuk dapat melakukan kecurangan. Semakin tinggi kompetensi aparatur justru dapat dengan mudah untuk memanfaatkan kompetensi yang dimiliki untuk mencapai kepentingan pribadinya.

Hasil penelitian ini juga sejalan oleh penelitian Khoyrul Mustaqin (2022), dimana didalam penelitiannya semakin tinggi kompetensi seorang aparatur maka pencegahan kecurangan akan semakin sulit dilakukan. Hal tersebut dikarenakan semakin aparatur memiliki kompetensi yang tinggi justru dapat dengan mudah melakukan manipulasi laporan keuangan sehingga tidak terdeteksi oleh aparatur yang lain.

### Pengaruh *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan Kecurangan

Berdasarkan hasil dari data yang diolah, menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dimana semakin tinggi tingkat *whistleblowing* pegawai, maka tingkat kecurangan akan semakin rendah. Dengan pengelolaan yang baik, *whistleblowing system* dapat menjadi suatu wadah yang sangat berguna dalam mengidentifikasi dan mencegah kecurangan di lingkungan pemerintahan.

Hasil penelitian ini mendukung *fraud triangle theory*, dimana Kecurangan (*fraud*) terjadi karena adanya suatu *opportunity* (peluang atau kesempatan) yang dapat disebabkan oleh munculnya beberapa permasalahan, seperti pengendalian internal yang berjalan tidak baik yang berujung menjadi lemah, kurangnya pengawasan, serta adanya kewenangan yang disalahgunakan sehingga kecurangan dapat dengan mudah dilakukan. Dengan kesempatan

yang ada melalui suatu sistem pengaduan berupa *Whistleblowing system*, para pegawai ataupun pihak – pihak dapat dengan mudah untuk melaporkan kecurangan yang mereka ketahui tanpa takut adanya intimidasi yang mereka dapatkan nantinya. Hasil penelitian ini juga didukung oleh *Theory of planned behavior*, dimana teori ini menekankan mengenai perilaku yang dipengaruhi oleh niat seseorang. Dimana jika seseorang memiliki niat untuk melaporkan kecurangan yang mereka ketahui maka mereka akan memanfaatkan adanya sistem ini untuk mengungkap kecurangan yang mereka ketahui.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Taufik & Nasir (2020), Anggraeni et al., (2021), Puspitanisa & Purnamasari (2021), dan Anandya & Werastuti (2020) yang mengatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh secara signifikan meningkatkan terjadinya pencegahan *fraud* semakin baik penerapan *whistleblowing system* di dalam perusahaan, maka semakin tinggi tingkat pencegahan kecurangan *Whistleblowing system* dapat mencegah terjadinya *fraud* karena sistem ini dapat dengan cepat mendeteksi adanya *fraud* sehingga dapat langsung di tindak lanjuti laporan yang telah disampaikan oleh *whistleblower*.

### **Pengaruh Kesadaran Anti-Kecurangan Terhadap Pencegahan Kecurangan**

Berdasarkan hasil dari data yang diolah, menunjukkan bahwa variabel kesadaran anti-kecurangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dimana semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh para aparatur, maka tingkat kecurangan akan semakin rendah.

Hasil penelitian ini mendukung *Theory of planned behavior*, dimana pada teori ini dikatakan bahwa niat seseorang akan mempengaruhi perilaku yang akan dilakukannya, sehingga perilaku seseorang dalam menciptakan kesadaran betapa pentingnya pencegahan kecurangan bagi dirinya dan semua pihak dalam suatu lingkungan organisasi dipengaruhi oleh niat dari seseorang tersebut dalam melakukannya. Maka dari itu sebuah pencegahan *fraud* akan tercipta melalui kesadaran yang ada pada setiap individu maupun organisasi mengenai pentingnya upaya pencegahan *fraud* atau *anti-fraud awareness*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arpani et al., (2022), Lubis & Budiwitjaksono (2022) dan Ibrahim et al., (2023) dimana didalam penelitian ini menyatakan bahwa kesadaran anti-kecurangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan artinya semakin tinggi kesadaran anti-kecurangan pegawai maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik.

### **Pengaruh *Ethical Climate* Terhadap Pencegahan Kecurangan**

Berdasarkan hasil dari data yang diolah, menunjukkan bahwa variabel *ethical climate* berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan. Artinya semakin tinggi tingkat iklim etika dalam suatu lingkungan belum dapat mencegah suatu kecurangan yang terjadi tanpa didukung oleh individu, kebijakan dan peraturan yang mendukung pencegahan kecurangan.

Hasil penelitian ini mendukung *fraud triangle theory*, jika suatu organisasi tidak memiliki iklim etis yang baik maka ini akan mempengaruhi persepsi karyawan mengenai praktik dan juga kebijakan organisasi. Jika kebijakan organisasi tidak dijalankan dengan baik maka akan muncul kesempatan bagi para pegawai untuk melakukan kecurangan dengan memanfaatkan celah dari prosedur yang berjalan tidak baik tadi. Perilaku dan peranan manajemen yang tidak berjalan dengan baik dan menggunakan jabatannya dengan sewenang-wenangnya akan menimbulkan tekanan terhadap para pegawai dan membuat para pegawai melakukan pembenaran terhadap tindakan merugikan yang mereka buat. Untuk itu diperlukannya dalam suatu instansi atau organisasi baik itu manajemen, pegawai serta kebijakan yang ada untuk mendukung pencegahan terhadap kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Susilo (2022), dimana pada penelitian ini *ethical climate* berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan karena iklim etika yang baik saja tidak dapat untuk melakukan pencegahan kecurangan untuk itu dibutuhkan juga individu dan kebijakan yang mendukung.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki oleh aparatur maka pencegahan kecurangan akan menurun. Hal tersebut dikarenakan semakin aparatur memiliki kompetensi yang tinggi justru dapat dengan mudah melakukan kecurangan.
2. *Whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Dapat disimpulkan bahwa semakin efektif *Whistleblowing system* digunakan maka pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan baik.

3. Kesadaran Anti-Kecurangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh para aparatur, maka tingkat kecurangan akan semakin rendah.
4. *Ethical climate* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Dapat disimpulkan bahwa, *ethical climate* yang baik di suatu lingkungan belum mampu mencegah terjadinya suatu kecurangan, tanpa didukung oleh individu dan kebijakan yang mendukung pencegahan kecurangan.

### Referensi

- ACFE Indonesia. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Diakses Dari : <https://Acfe-Indonesia.Or.Id/Survei-Fraud-Indonesias>
- Arpani, M. L., Silfi, A., & Anggraini, L. (2022a). Pengaruh whistleblowing system, kompetensi aparatur dan kesadaran Anti kecurangan terhadap pencegahan kecurangan (Studi Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau). *SYNERGY: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2(1), 34–44. <https://doi.org/10.52364/synergy.v2i1.16>
- Cucuani, H., Sulastiana, M., Harding, D., & Agustiani, H. (2022). PENGARUH ETHICAL CLIMATE TERHADAP COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR DALAM INSTANSI PEMERINTAHAN DAERAH. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 12(2), 134. <https://doi.org/10.24036/rapun.v12i2.114449>
- Dianingsih, D. H., & Pratolo, S. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Intensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing: Studi Empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Pemerintah Kota serta Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/rab.020120>
- Hariawan, I. M. H., Sumadi, N. K., & Erlinawati, N. W. A. (2020b). PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, WHISTLEBLOWING SYSTEM, DAN MORALITAS INDIVIDU TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 586–618. <https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.791>
- <https://www.skinusantara.com/home/2023/11/14/pmii-desak-bpkp-riau-keluarka/>. Diakses pada 02 Januari 2024

- Pratama, Wempi Yudha. 2020. PENGARUH WHISTLEBLOWING SYSTEM, KOMPETENSI, APARATUR DAN KESADARAN ANTI KECURANGAN TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (Studi Empiris Pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Provinsi Riau). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Riau.s
- Puspitanisa, W., & Purnamasari, P. (2021). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 42–46. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.188>
- Robbie, I., & Praharjo, A. (2020). Bagaimana Iklim Etis Dan Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Terhadap Efektifitas Pemimpin? *At-Tadbir : jurnal ilmiah manajemen*, 4(2), 81. <https://doi.org/10.31602/atd.v4i2.2666>